

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN ANTARNEGARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Ati Widiati
Pusat PKPDS – BPPT

Abstract

It is necessary to formulate spatial policy and strategy in cross-border area in East Nusa Tenggara, in order to manage resources and capability, to increase the quality of life, to conserve the function of environment, and to achieve security. Until now, there is no comprehensive policy and strategy about spatial planning for cross-border area. Using the growth poles concept, this paper tries to arrange a holistic policy and strategy for East Nusa Tenggara spatial planning which is viewed from many development aspects. This paper also describes about the development programmes and activities for 2006-2010 period.

Kata Kunci : Kebijakan, strategi, program, penataan ruang, Nusa Tenggara Timur

1. PENDAHULUAN

Kawasan perbatasan antarnegara antara Republik Indonesia (RI) dan Republik Demokratik Timor Leste (RDRTL) terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Berdasarkan *Arrangement on Traditional Border Crossings and Regulated Markets* antara Pemerintah RI dengan Pemerintah RDRTL (ditandatangani tanggal 11 Juni 2003 di Jakarta), telah disepakati bahwa kawasan perbatasan antarnegara di wilayah Provinsi NTT meliputi 10 kecamatan perbatasan darat dan 3 kecamatan perbatasan laut (lihat Tabel 1 dan Lampiran 1). Kawasan perbatasan di wilayah RDRTL meliputi 11 subdistrik. Sementara itu, masih ada satu lagi kabupaten di provinsi ini yang berbatasan dengan negara lain, yakni Kabupaten Rote Ndao, yang berbatasan laut dengan negara Australia.

Penentuan batas antarnegara untuk tipologi laut mengacu pada Batas Laut Teritorial (BLT), Batas ZEE, Batas Landas Kontinen (BLK), Batas Zona Tambahan (BZT), dan Batas Zona Perikanan Khusus (*Special Fisheries Zone/SFZ*). BZT dan SFZ antara RI dan RDRTL belum ada kesepakatan yang dituangkan dalam dokumen resmi.

Adapun untuk BLT, ZEE, dan BLK perbatasan RI dan negara-negara tetangga adalah (Bakosurtanal dan Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan, 2002) sebagai berikut :

Tabel 1
Kawasan Perbatasan Antarnegara RI
dengan Timor Leste dan Australia
di Provinsi NTT

Kabupaten	Kecamatan	Negara
Darat		
Belu	Raihat Lakmanen Tasifeto Timur Tasifeto Barat Kobalima	Timor Leste (District Bobonaro dan District Covalima)
Timor Tengah Utara	Insana Insana Utara Miomaffo Timur Miomaffo Barat	Timor Leste (District Oecussi)
Kupang	Amfoang Utara	Timor Leste (District Oecussi)
Laut		
Alor	Alor Timur Alor Barat Daya Pantar	Timor Leste (District Bobonaro)
Rote Ndao	Rote Barat Daya Rote Barat Laut Lobalain Rote Tengah Pantai Baru Rote Timur	Australia

Sumber : diolah dari Hamid, 2001; Alkadri dan Hamid, 2003; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2004; Jusnadi dkk., 2005.

1. Batas Laut Teritorial
Batas laut teritorial Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste masih

belum ditetapkan secara pasti karena beberapa hal berikut masih perlu dilakukan :

- Penyesuaian titik-titik *tri-junction* Z_{28} dan Z_{36} , serta A_{16} dan A_{17} di Laut Timor.
- Penyambungan titik-titik dasar/garis pangkal kepulauan dari TD.109 hingga TD.115 yang melalui pulau-pulau Leti, Kisar, Wetar, Liran, Alor, Pantar, hingga Pulau Batek.

Untuk penetapan batas laut di bagian selatan Pulau Timor, harus melibatkan Australia secara trilateral (RI–RDTL–Australia).

2. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Batas ZEE mengacu pada perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Batas ZEE dan Batas-Batas Laut Tertentu pada tanggal 14 Maret 1997, yaitu yang melalui koordinat titik-titik batas mulai dari Z_1 hingga Z_{28} .
3. Batas Landas Kontinen (BLK)
Batas Landas Kontinen mengacu pada perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Penetapan BLK dan Batas-Batas Laut Tertentu, yang telah diratifikasi melalui Keppres RI Nomor 42 Tahun 1971 dan Nomor 66 Tahun 1972, yaitu berjarak kurang dari 400 mil-laut, dan melalui koordinat titik-titik mulai dari A_1 hingga A_{16} dan A_{17} hingga A_{25} .

Penentuan batas teritorial antarnegara sangat penting ditetapkan mengingat kawasan perbatasan antarnegara memiliki peran yang sangat vital dan strategis, baik dari aspek pertahanan keamanan maupun ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan kawasan perbatasan antarnegara memiliki potensi dan peluang untuk tumbuh dan berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru. Namun, penanganan kawasan perbatasan antarnegara lebih banyak didominasi oleh permasalahan dibanding pencapaian kemajuan pembangunan.

Beberapa permasalahan yang menonjol di antaranya diidentifikasi sebagai berikut (Hamid, 2001; Alkadri dan Hamid, 2003; Hamid dan Sri Handoyo Mukti, 2001; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2004; Jusnadi dkk., 2005; Mukti, 2001) :

1. Kaburnya garis perbatasan wilayah NKRI akibat rusaknya patok-patok perbatasan, sehingga Indonesia terancam bisa kehilangan wilayah kedaulatan, seperti kasus Sipadan-Ligitan beberapa tahun lalu.
2. Belum terintegrasinya pengelolaan kawasan lindung lintas negara dalam program kerja sama bilateral RI–RDTL.
3. Kurang sinkronnya kebijakan-kebijakan yang diterapkan untuk kawasan perbatasan antar-

negara oleh berbagai instansi pemerintah (pusat dan daerah), sehingga diperlukan koordinasi yang lebih mantap dan terpadu yang melibatkan banyak pengambil kebijakan.

4. Belum terkoordinasinya antarpengelola sumberdaya alam, sehingga eksploitasi sumberdaya alam kurang menguntungkan bagi masyarakat dan pengembangan daerah.
5. Belum adanya kepastian hukum bagi suatu instansi dalam operasionalisasi pembangunan di wilayah perbatasan antarnegara.
6. Adanya kebutuhan akan penetapan pelintas batas di sepanjang kawasan perbatasan Provinsi NTT–RDTL yang diselaraskan dengan pos-pos pelintas batas, baik keterkaitan ke dalam maupun dengan klaster pertumbuhan di negara tetangga.
7. Pos pemeriksaan lintas batas (PPLB) darat yang legal di sepanjang garis perbatasan Provinsi NTT–RDTL yang disepakati Indonesia dan Timor Leste sangat terbatas. Padahal kawasan ini mempunyai posisi strategis yang berdampak terhadap pertahanan keamanan dan politik.
8. Kemiskinan masyarakat di Provinsi NTT akibat keterisolasian wilayahnya dari aksesibilitas ke bagian lain di negaranya sendiri dan masuknya produksi dalam negeri, menjadi pemicu bagi pelintas batas dari Indonesia untuk memperbaiki kondisi ekonominya di negara tetangga.
9. Adanya kesenjangan sarana dan prasarana wilayah antarkedua negara, berupa jaringan jalan dan moda transportasi darat, jaringan dan kapasitas telekomunikasi, jaringan dan daya pasang listrik, jaringan informasi, dan infrastruktur lainnya.
10. Adanya masalah atau gangguan hubungan bilateral antarnegara yang berbatasan akibat dari berbagai peristiwa, baik terkait dengan aspek keamanan dan politis maupun pelanggaran dalam pengelolaan dan eksploitasi sumberdaya alam lintas batas negara (darat dan laut).

Jika ditelusuri lebih jauh, maka akar masalah dari berbagai hal di atas sebenarnya adalah akibat belum adanya sebuah pedoman berupa perencanaan tata ruang kawasan perbatasan yang mengatur secara khusus dan komprehensif mengenai struktur ruang dan alokasi penggunaan lahan di kawasan perbatasan Provinsi NTT–RDTL.

Untuk mengatasi berbagai persoalan di atas, pengembangan kawasan perbatasan Provinsi NTT–RDTL harus dilakukan secara menyeluruh karena menyangkut berbagai aspek/bidang, lokasi,

dan pelaku pembangunan. Penanganan yang *holistic* perlu diletakkan dalam suatu konsep pengembangan kawasan perbatasan antarnegara yang memuat kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang terpadu serta jelas tahapan pengembangan dan *stakeholders*-nya.

Penyusunan kebijakan dan strategi penataan ruang kawasan perbatasan Provinsi NTT–RDTL merupakan salah satu acuan spasial dan sektoral untuk mengelola sumberdaya dan kapabilitas yang dimiliki, meningkatkan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat, melestarikan fungsi lingkungan, serta menciptakan ketertiban dan keamanan di kawasan perbatasan Provinsi NTT.

Tujuan penyusunan kebijakan dan strategi penataan ruang kawasan perbatasan Provinsi NTT–RDTL adalah untuk :

- a. Mendorong keterpaduan kebijakan dan pembangunan kawasan perbatasan Provinsi NTT–RDTL untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara.
- b. Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan Provinsi NTT–RDTL melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan membuka keterisolasian wilayah dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan nilai sosial budaya setempat.
- c. Mendorong perwujudan kerja sama ekonomi subregional Provinsi NTT–RDTL secara sinergis dan seimbang dengan menganut keserasian antara pendekatan pertahanan keamanan dan pendekatan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan-kawasan sentra produksi yang sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan pasar serta memiliki akses transportasi dan pemasaran ke negara tetangga dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan nilai kearifan lokal.
- b. Terwujudnya pengelolaan hutan konservasi dan hutan lindung dan hutan produksi secara sinergis dan integratif.
- c. Terhindarinya pergeseran patok-patok batas wilayah kedaulatan NKRI.
- d. Terwujudnya pengembangan dan sistem jaringan pelayanan prasarana dan sarana wilayah yang sinergis di antara negara bertetangga untuk membuka keterisolasian daerah-daerah perbatasan.
- e. Berfungsinya sistem kota-kota, baik dari segi kepentingan ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, hingga lingkungan.
- f. Berfungsinya pengembangan PPLB dengan dukungan sarana dan prasarana pengawasan

kepabeanaan (*custom*), keimigrasian (*immigration*), karantina (*quarantine*), dan keamanan (*security*) dalam upaya mengurangi kegiatan penyelundupan, terutama kayu ilegal dan perdagangan ilegal.

2. BAHAN DAN METODE

Konsep dasar yang digunakan dalam penataan ruang kawasan perbatasan Provinsi NTT–RDTL mengacu pada pola pemanfaatan ruang dan struktur yang telah ditetapkan diatur dalam RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) dan RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi).

Di dalam RTRWN, struktur ruang dijabarkan dalam bentuk PKSN (pusat kegiatan strategis nasional), PKN (pusat kegiatan nasional), dan PKW (pusat kegiatan wilayah), dan kemudian ditindaklanjuti oleh RTRWP untuk mengatur PKL (pusat kegiatan lokal). Sedangkan pola pemanfaatan ruang, baik dalam RTRWN maupun RTRWP, dipilah menjadi kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan tertentu.

Selanjutnya, untuk mewujudkan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan Provinsi NTT yang terpadu dan terintegratif, maka dibentuk kawasan pengembangan ekonomi (KPE).

Dengan demikian, konsepsi penataan ruang kawasan perbatasan antarnegara di Provinsi NTT adalah sebagai berikut :

- Penataan kawasan pengembangan ekonomi sebagai pusat-pusat pertumbuhan.
- Penataan pusat kegiatan strategis nasional karena NTT merupakan provinsi yang terletak di kawasan perbatasan.
- Penataan pusat kegiatan nasional, wilayah, dan lokal.
- Penataan kawasan konservasi untuk pelestarian fungsi lingkungan.
- Penataan kawasan budidaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Penataan kawasan tertentu, terutama untuk pertahanan dan keamanan.

Di samping dalam bentuk penataan kawasan-kawasan di atas, penataan ruang kawasan perbatasan antarnegara di Provinsi NTT perlu pula diiringi dengan :

- Pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan.
- Pengembangan prasarana dan sarana pelabuhan udara dan pelabuhan laut.
- Pengembangan prasarana dan sarana permukiman dan perumahan.
- Pengembangan prasarana dan sarana ketenagalistrikan, telekomunikasi, air bersih.

- Pengembangan prasarana dan sarana pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Profil Kawasan Perbatasan Antarnegara di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Secara geografis, Provinsi NTT merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 566 pulau (246 pulau di antaranya sudah memiliki nama dan 320 pulau belum memiliki nama). Di antara pulau yang sudah memiliki nama, terdapat 42 pulau yang telah berpenghuni. Beberapa pulau besar antara lain adalah Pulau Sumba, Sabu, Rote, Ndao, Timor (bagian barat), Flores, Andonara, dan pulau-pulau lain di Kepulauan Alor.

Di Kabupaten Rote Ndao terdapat 96 pulau, terdiri dari 6 pulau berpenghuni (yaitu Rote, Ndao, Nuse, Landu, Nusa Manuk, Usu) dan 90 pulau tidak berpenghuni. Sebanyak 17 pulau belum bernama dan 79 pulau lainnya sudah bernama. Sementara itu, di Kabupaten Kupang terdapat 27 pulau yang meliputi 5 pulau dihuni (yakni Timor, Sabu, Semau, Rajua, Kera) dan 22 pulau tidak dihuni. Pulau yang ada namanya berjumlah 18 pulau dan tak bernama 9 pulau.

3.2. Penataan Ruang dan Infrastruktur

Penataan ruang di sepanjang kawasan perbatasan Provinsi NTT–RDTL hingga kini belum tuntas dijabarkan secara detil dan mempunyai kekuatan hukum. Hal ini antara lain disebabkan masih berlangsungnya proses pemekaran wilayah, baik pada level kabupaten, kecamatan, maupun desa. Pemekaran tersebut tentu saja berpengaruh pada perubahan struktur tata ruang.

Di samping penataan ruang yang belum selesai, zona-zona potensial di kawasan perbatasan juga belum berkembang. Keadaan ini di antaranya diakibatkan oleh :

- Belum tertatanya kawasan pemukiman yang ada, terutama akibat budaya penduduk pedalaman yang berpindah-pindah.
- Belum tertatanya kawasan lindung dan wisata ekologi yang menyebar hampir di sepanjang kawasan perbatasan Provinsi NTT–RDTL.
- Belum tertatanya kawasan budidaya dan sektor primer lainnya.
- Belum teralokasikannya kawasan-kawasan bisnis, perdagangan, jasa, dan industri.
- Belum tertatanya kawasan potensial di kawasan perbatasan.

Sementara itu, dalam hal infrastruktur, kawasan perbatasan Provinsi NTT–RDTL memiliki prasarana dan sarana wilayah yang sangat minim, baik akses darat, laut, dan udara dari dan ke

kawasan perbatasan, infrastruktur listrik, air bersih, telekomunikasi, dan informasi, infrastruktur ekonomi, maupun infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan sanitasi lingkungan. Meskipun demikian, saat ini pemerintah tengah mengembangkan berbagai infrastruktur berikut ini :

- Pengembangan jalan arteri primer yang menghubungkan Kupang-Soe-Kefamenanu-Atambua.
- Pengembangan jalan kolektor primer yang menghubungkan pos lintas batas negara dengan PKN, yaitu ruas-ruas Wini-Maubesi, Sakato-Wini-Atapupu, Motaain-Atapupu-Atambua, Napan-Kefamenanu, Motamasin-Halilulik, Haekesak-Atambua, Baa-Papela, Kalabahi-Taramana-Marataing, Seba-Bollow, Haimeni Ana-Soe.
- Pengembangan prasarana sumber air baku dari Sungai Warmre, Muturi, Aitinyo, Klasagun (SWS Wasi-Kais-Omba); Sungai Buik, Luradik, Baukama, Baukoek, Malibaka, Motamuru, Noel Besi, Welulik, Murabesi dan Napan.
- Pengembangan sistem kelistrikan dan telekomunikasi di kawasan perbatasan yang meliputi pembangunan PLTD dan telekomunikasi, perluasan jaringan listrik dan telekomunikasi, serta peningkatan status pelayanan kantor PLN dan Telkom. Pengembangan kelistrikan dan telekomunikasi di PKN meliputi Kota Kupang dan Atambua, di PKW meliputi Kota Bea (Rote Ndao), Betun (Belu), Naikliu (Kupang), Kalabahi (Alor), Seba (Sabu/Kupang), Kefamenanu (TTU).
- Penetapan Bandar Udara Eltari (Kupang), Haliwen (Belu), Mali-Alor, Lekunik-Rote Ndao, Tardamu-Sabu sebagai bandar udara pusat penyebaran skala sekunder yang melayani penumpang dan barang dengan lingkup pelayanan antarprovinsi (NTT, NTB, Maluku dan Sulawesi Selatan); Penetapan Bandar Udara Atambua (Haliwen) dan Bandar udara Rote (Ingusati) sebagai bandar udara pusat penyebaran skala tersier dengan lingkup pelayanan dalam satu Provinsi NTT serta terhubung ke daerah lain dan luar negeri.

3.3. Perekonomian

Dalam konteks perekonomian internasional, komoditas ekspor utama Provinsi NTT terdiri dari kopi, tuna, cakalang, ikan ekor kuning, kacang mete, kakao dan vanili. Pada tahun 2003, nilai ekspor komoditas ini mencapai US\$22.169.789.09, naik 20,30% dibanding tahun 2002. Di samping itu, Provinsi NTT juga merupakan salah satu daerah tujuan investasi terkemuka di Kawasan Timur Indonesia. Selama periode 1972-2003, nilai investasi PMA adalah US\$292.075.947, yang

didominasi oleh bidang pertanian (terutama perikanan), perhotelan, *real estate*, dan industri.

Potensi perekonomian yang diandalkan oleh Provinsi NTT untuk menjadi sumber keunggulan komparatif sebagian besar berbasis sumberdaya alam. Di antaranya adalah :

1. Pertanian dan Perkebunan

Komoditas potensial yang dapat dikembangkan bagi kegiatan investasi dan perdagangan terdiri dari jambu mete, kopi, kakao, dan vanili. Jambu mete potensial dikembangkan di kabupaten Sikka, Ende dan Sumba Timur dengan potensi produksi sebesar 12.857 ton/tahun. Kopi potensial diusahakan di Manggarai dan Waikabubak dengan potensi produksi 15.240 ton/tahun. Kakao potensial dikembangkan di Kabupaten Belu, Sikka, dan Sumba Barat dengan potensi produksi 5.322 ton/tahun. Sedangkan komoditas vanili paling potensial di Kabupaten Manggarai, Ngada, dan Sumba Barat dengan potensi produksi sebesar 436 ton/tahun.

2. Perikanan

Provinsi NTT memiliki sumberdaya perikanan yang sangat melimpah, baik perikanan laut, darat, maupun perairan umum. Komoditas perikanan yang sangat menjanjikan untuk pengembangan investasi dan perdagangan adalah kerapu, teripang, mutiara, dan rumput laut. Ikan kerapu paling banyak dihasilkan di Kabupaten Ende, Sikka, Flores Timur, Lembata, dan Kupang dengan potensi produksi sebesar 4,9 ton/tahun. Teripang potensial dikembangkan di Kabupaten Kupang, Ende, dan Sikka dengan potensi produksi 5,2 ton/tahun. Mutiara potensial dibudidayakan di Kabupaten Alor, Kupang, Lembata, Flores Timur, Sikka, dan Manggarai Barat. Sedangkan rumput laut dengan potensi produksi mencapai 6.304 ton/tahun paling sesuai diusahakan di Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Ende, Sikka, Flores Timur, Lembata, Alor, Kupang, dan Belu.

3. Peternakan

Kegiatan peternakan, baik ternak besar maupun ternak kecil, terdapat hampir di semua kabupaten. Menurut data tahun 2003, ternak sapi terbesar terdapat di Kabupaten Kupang, kerbau di Kabupaten Manggarai, dan kuda di Kabupaten Sumba Timur. Sedangkan ternak kecil seperti babi, kambing, dan domba menyebar di semua kabupaten.

4. Kehutanan

Komoditas kehutanan yang menjadi andalan dan unggulan Provinsi NTT adalah kemiri. Selain terbuka peluang untuk budidaya, investasi juga dapat dilakukan melalui pembangunan industri pengolahan dan

pemasaran hasil kemiri. Lokasi paling sesuai untuk pengembangan tanaman kemiri antara lain adalah Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Utara. Potensi produksi yang dapat dihasilkan oleh kedua kabupaten ini dan beberapa kabupaten lainnya diperkirakan mencapai 14.713,97 ton per tahun.

5. Pertambangan

Wilayah Provinsi NTT mempunyai kandungan berbagai macam sumberdaya mineral dan energi yang melimpah. Beberapa bahan tambang potensial yang berhasil ditemukan di kabupaten-kabupaten perbatasan adalah :

- Emas, antara lain terdapat di Kupang dan Timor Tengah Utara.
- Tembaga, antara lain ditemukan di Kupang, Timor Tengah Utara, dan Alor.
- Mangan, antara lain dijumpai di Kupang dan Timor Tengah Utara.
- Nikel, antara lain di Kupang dan Belu.
- Andesit, antara lain terdapat di Alor.
- Batu apung, antara lain ada di Alor.
- Batu marmer di Timor Tengah Utara.
- Batu gamping, di Kupang, Belu, dan Alor.

Selama ini, potensi tersebut belum optimal pemanfaatannya, sehingga terbuka peluang yang prospektif bagi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang di Provinsi NTT.

6. Pariwisata

Provinsi NTT sangat kaya akan objek wisata. Banyak yang masih asli. Salah satunya adalah terumbu karang. Di samping itu, ada Pantai Nembrala yang sangat cocok untuk selancar karena memiliki ombak berskala internasional. Objek wisata lainnya adalah air terjun tiga tingkat (70 m) di Oenesu, Pantai Ba'a, Pantai Watu Ria, Pantai Nembrala di Kab Rote Ndao, Pantai Deri di Adonara Kab Alor, Selancar Angin di Pantai Waiara, Pantai Riang Sunge di P. Solor, Pantai Oa, Pantai Oenggae, Panorama Alam Pantai Kolbano Kab TTS, Pantai Papela.

Danau Kelimutu atau yang biasa disebut Danau Tiga Warna merupakan salah satu keajaiban alam di Provinsi NTT, tepatnya 66 km dari Kota Ende. Danau ini sangat unik dan luar biasa, dimana terdapat tiga macam warna. Ketiga warna ini selalu berubah-ubah. Menurut legenda, warna danau ini adalah merah, biru, dan putih dengan perbandingan beberapa macam warna antara lain hijau, hijau muda, dan hitam.

Air Terjun Oehala terdapat di Kota Soe, dengan daya tarik berupa kesejukan atau suasana berteduh di bawah lopo-lopo, gubuk beratap sederhana, dengan desiran air di air terjun Oehala yang bertingkat tujuh. air terjun ini cukup deras, sehingga di area ini terdapat pula Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Air Terjun Laputi merupakan objek wisata di Desa Praingkareha Kecamatan Tabundung, berjarak sekitar 114 km dari Waingapu. Laputi airnya mengalir sepanjang tahun melalui hamparan bebatuan yang bertingkat-tingkat. Di puncaknya terdapat sebuah danau keramat, dimana terdapat belut yang tabu untuk ditangkap dan dimakan.

3.4. Sosial Budaya Masyarakat Provinsi NTT

Jumlah penduduk Provinsi NTT tahun 2004 mencapai 4.188.774 jiwa, dimana 1.162.580 jiwa (27,75%) di antaranya terdapat di kabupaten-kabupaten perbatasan (lihat Tabel 2).

Tabel 2
Jumlah Penduduk di Provinsi NTT
Menurut Kabupaten/Kota, 2004

Kabupaten/Kota	Jumlah (jiwa)	Persentase
Kupang	337.406	8,06
TTU	197.174	4,71
Belu	352.136	8,41
Alor	170.965	4,08
Rote Ndao	104.899	2,50
TTS	405.993	9,69
Sumba Barat	399.580	9,54
Sumba Timur	203.525	4,86
Lembata	99.458	2,37
Flores Timur	218.257	5,21
Sikka	280.841	6,70
Ende	241.826	5,77
Ngada	245.169	5,85
Manggarai	487.192	11,63
Manggarai Barat	186.209	4,45
Kota Kupang	258.104	6,16
Nusa Tenggara Timur	4.188.774	100,00

Sumber : BPS Provinsi NTT (2003).

Kebudayaan, sistem religius, dan bahasa daerah Provinsi NTT banyak dipengaruhi oleh budaya dan bahasa suku-suku bangsa lain di Indonesia, misalnya Jawa, Bugis Makassar, dan Ambon. Selain itu, juga ada pengaruh dari bangsa asing seperti Portugis dan Belanda yang terbawa melalui jalur perdagangan dan politik.

Masyarakat Provinsi NTT pada dasarnya memiliki sifat yang taat, utuh, setia, dinamis, dan patuh. Keinginan untuk maju cukup besar, namun bersifat "tertutup", karena masih dipengaruhi oleh tradisi dan kebiasaan-kebiasaan lama. Mereka sukar untuk menyampaikan permasalahannya kepada siapa saja yang tidak atau belum dikenal.

4. KESIMPULAN

4.1. Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Provinsi NTT-RDTL

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disusun kebijakan penataan ruang kawasan perbatasan Provinsi NTT-RDTL sebagai berikut :

- Mendorong pengembangan kawasan perbatasan sebagai "beranda depan" dan pintu gerbang internasional Negara RI ke Negara RDTL khususnya Distrik Bobonaro, Covalima, dan Oecussi.
- Melakukan pembangunan kawasan perbatasan antarnegara secara berimbang berdasarkan prinsip kesejahteraan masyarakat, pertahanan keamanan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- Mendorong kerja sama yang saling menguntungkan antarnegara, Pusat dan Daerah, pemerintah dan masyarakat, serta antardunia usaha.
- Memberikan perlindungan terhadap kawasan konservasi dunia dan kawasan lindung yang strategis berskala nasional.
- Mendorong pembangunan kawasan pengembangan ekonomi (KPE) secara selektif yang didukung oleh kegiatan ekonomi sesuai potensi unggulan setempat.
- Mendorong pengembangan sarana pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, permukiman, tenaga kerja, kependudukan.

4.2. Strategi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Provinsi NTT-RDTL

Merujuk pada kebijakan di atas, maka strategi penataan ruang kawasan perbatasan Provinsi NTT-RDTL mencakup beberapa hal di bawah ini :

- Menetapkan dan membangun Belu dan Kupang sebagai kawasan pengembangan ekonomi (KPE) dimana :
 - KPE Belu meliputi 5 wilayah administrasi kecamatan yang berbatasan langsung, yaitu Kobalima, Tasifeto Barat, Tasifeto Timur, Raihat, dan Lakmanen. Sektor unggulan KPE ini pertanian, perkebunan, agroindustri, dan perdagangan. Pertanian lahan basah dikembangkan di Tasifeto Barat, Raihat, dan Lamaknen yang didukung dengan sistem irigasi teknis, setengah teknis, dan irigasi sederhana. Sektor perkebunan dapat dikembangkan di Tasifeto Timur, Tasifeto Barat, Lamaknen, dan Kobalima. Pengembangan agroindustri dipusatkan di Kota Atambua, Kota Boas, dan Kota Betun dengan basis komoditas perkebunan yang dikembangkan di kelima kecamatan, terutama jambu mede dan kemiri. Sektor perdagangan dikembangkan pada pasar perbatasan yang lokasinya telah disepakati bersama antarkedua negara, yaitu di

Motaain, Haekesak, dan Metamauk (Motamasin).

- KPE Kupang mencakup 5 kecamatan yang berbatasan langsung, yaitu Amfoang Utara di Kabupaten Kupang serta Miomafo Barat, Miomafo Timur, Insana, dan Insana Utara di Kabupaten Timor Tengah Utara. Sektor unggulan KPE ini adalah pertanian, perkebunan, industri, perdagangan, dan perikanan. Sektor pertanian dan perkebunan dapat dikembangkan di Amfoang Utara dan Insana Utara, selain itu sektor perkebunan juga dapat dikembangkan di Miomafo Barat, Miomafo Timur, dan Insana. Untuk mendukung sektor perkebunan dapat dikembangkan agroindustri di kota-kota Oepoli, Haumeni Ana, Nikiniki, Panite, Camplong, dan Babau. Selain itu, dapat pula dikembangkan industri kerajinan tenun yang berpusat di Kota Kefamenanu. Industri pengolahan dapat dipusatkan di Kota Kupang dan Kota Soe. Pengembangan sektor perikanan dipusatkan di Kota Wini. Sedangkan pengembangan sektor perdagangan dapat dikembangkan pada lokasi pasar perbatasan di Napan, Oepoli, dan Wini.
- b. Menetapkan dan membangun pusat kegiatan strategis nasional (PKSN), yakni Kota Atambua untuk KPE Belu dan Kota Kupang untuk KPE Kupang.
- c. Menetapkan dan membangun pusat kegiatan nasional (PKN), yakni Kota Kupang di KPE Kupang.
- d. Menetapkan dan membangun pusat kegiatan wilayah (PKW), yakni Kota Soe di KPE Kupang.
- e. Menetapkan dan membangun pusat kegiatan lokal (PKL), yakni Kota Kefamenanu, Kota Camplong, Kota Buraen, dan Kota Oisina di KPE Kupang.
- f. Meningkatkan aksesibilitas antar-PKN, antara PKN dengan PKW dan kota sekitarnya, antar-PKW, antara PKW dengan PKL, serta akses lintas batas negara.
- g. Menetapkan dan membangun kota-kota yang terletak pada titik-titik batas antarnegara sebagai kota-kota yang berfungsi khusus dan dilengkapi dengan prasarana dan sarana lintas batas, yakni kota-kota Motaain, Haekesak, Builalu, Motamasin/Metamauk, Atapupu (laut) di KPE Belu, serta kota-kota Wini (laut), Napan, Haumeni Ana, dan Oipoli di KPE Kupang.
- h. Menetapkan kawasan andalan dan kawasan andalan laut yang meliputi Kawasan Andalan Kupang dsk., Kawasan Andalan Maumere-

Ende, Kawasan Andalan Komodo dsk., Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa, Kawasan Andalan Sumba, Kawasan Andalan Laut Sawu dsk., dan Kawasan Andalan Laut Sumba dsk.

- i. Menetapkan dan melakukan upaya perlindungan terhadap kelestarian fungsi kawasan lindung nasional sesuai karakteristiknya masing-masing (lihat Tabel 3).
- j. Meningkatkan kerja sama ekonomi subregional, melalui pengembangan prasarana dan sarana lintas negara, pengelolaan kawasan konservasi, serta kerja sama pertahanan keamanan antarnegara
- k. Memberikan fungsi pertahanan dan keamanan pada wilayah tertentu untuk menjaga keutuhan NKRI.
- l. Menetapkan Pelabuhan Tenau-Kupang sebagai simpul pelabuhan internasional dalam pengembangan transportasi laut nasional.
- m. Menetapkan bandar udara sebagai simpul transportasi udara nasional, yang terdiri dari Bandara Eltari (Kota Kupang) sebagai pusat penyebaran sekunder, serta bandara Wai Oti (Maumere), H. Aroeboesman (Ende), Mau Hau (Waingapu), dan Haliwen (Atambua) sebagai pusat penyebaran tersier.

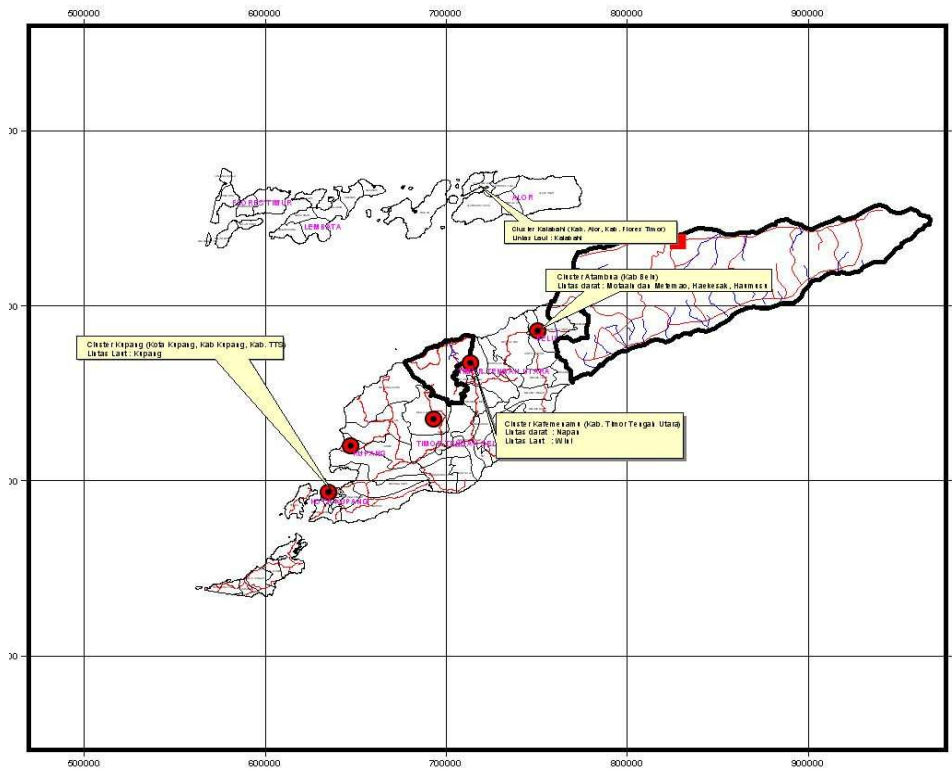
Tabel 3
Kawasan Lindung Nasional di Provinsi NTT

Kawasan Lindung Nasional	Luas (ha)
TWL Teluk Kupang	50.000
TWL Teluk Maumere	59.450
TWL Tujuh Belas Pulau	9.900
TN Kelimutu	5.000
TN Lai Wangi-wanggameti	47.014
TN Manupeu Tanah Daru	87.984
TN Komodo	173.300
TNL Komodo	75.000
THR Prof. Ir. Herman Yohanes	1.900
CA Riung	2.000
CA Maubesi	1.830
CA Way Wuul/Mburak	3.000
CA Gunung Langgaliru	15.638
CA Watu Ata	4.898
CA Wolo Talo, Ngedede Nalo Merah, Siung	4.016
SM Perhalu	1.000
SM Kateri	4.560
SM Harlu	2.000
TW Tuti Adigae	5.000

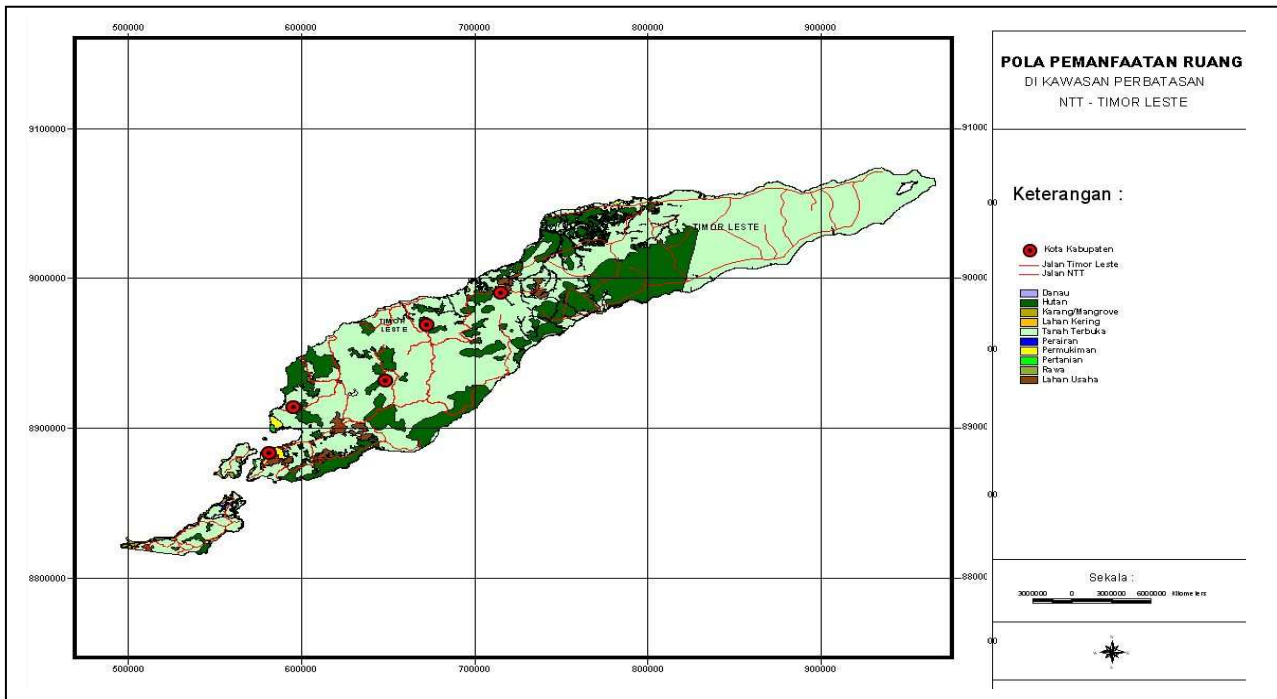
TW Alam Tujuh Belas Pulau	9.900
TW Pulau Besar	3.000
TW Manipo	2.499
TW Ruteng	32.248
Cagar Alam Laut Riung	2.000

Sumber : Hasil Analisis.

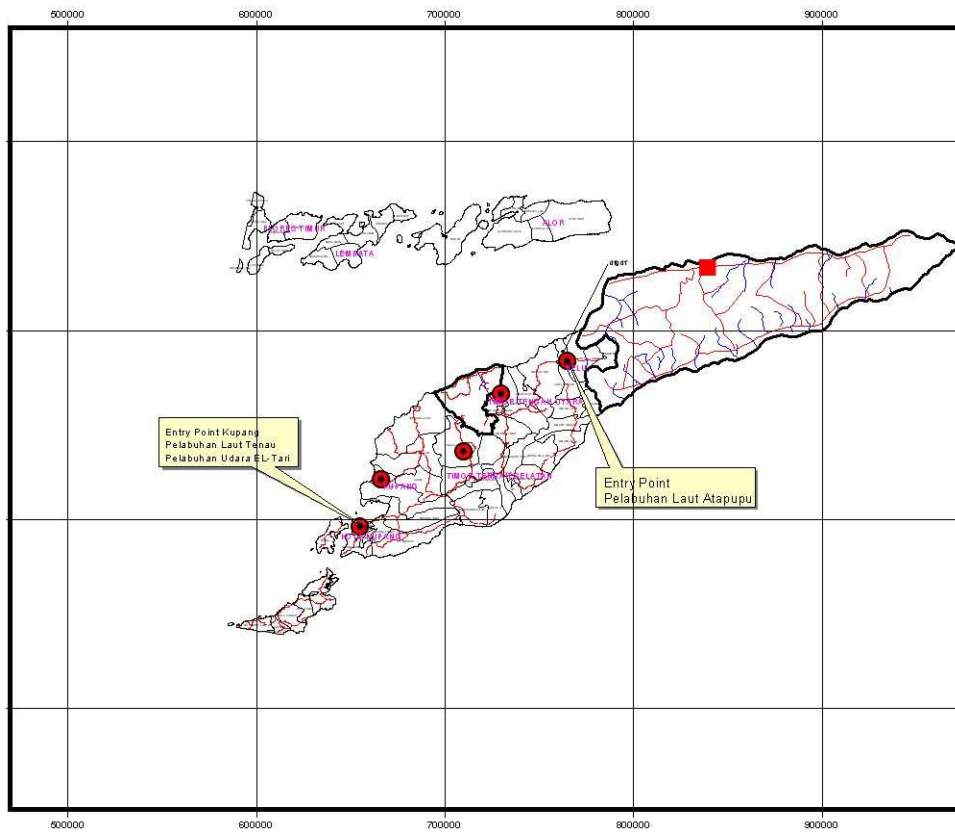
Kebijakan dan strategi penataan ruang kawasan perbatasan antarnegara di atas selanjutnya dijabarkan dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan perbatasan Provinsi NTT (lihat Gambar 1 dan Gambar 2). Sedangkan *entry point* kawasan perbatasan dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 1. Peta Struktur Ruang Kawasan Perbatasan Antarnegara Provinsi NTT



Gambar 2. Peta Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan Perbatasan Provinsi NTT



Gambar 3. Peta "Entry Point" Kawasan Perbatasan Antarnegara Provinsi NTT

DAFTAR PUSTAKA

- Alkadri dan Hamid (Penyunting), 2003, *Model dan Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan*, Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2003, *Proyeksi Penduduk NTT Tahun 2004-2010*.
- Bakosurtanal dan Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan, 2002.
- Hamid dan Sri Handoyo Mukti, 2001, "Permasalahan, Kebijakan, dan Usulan Program Pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan," dalam Hamid dkk. (Penyusun/Penyunting), *Kawasan Perbatasan Kalimantan : Permasalahan dan Konsep Pengembangan*, Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah, Jakarta.
- Hamid dkk. (Penyusun/Penyunting), 2001, *Kawasan Perbatasan Kalimantan : Permasalahan dan Konsep Pengembangan*, Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah, Jakarta.
- Jusnadi dkk., Achmad, 2005, *Platform Penanganan Permasalahan Perbatasan Antarnegara*, Cetakan Ke-2, Penerbit Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan, Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2004, *Kawasan Perbatasan : Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara di Indonesia*, Penerbit Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, September.
- Mukti, Sri Handoyo, 2001, "Konsep Pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan Indo-Malay Techno-Agropolitan Corridor," dalam Hamid dkk. (Penyusun/Penyunting), *Kawasan Perbatasan Kalimantan : Permasalahan dan Konsep Pengembangan*, Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah, Jakarta, hlm. 95.